

ANALISIS GENDER DAN RENCANA AKSI DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA REPELITA VI

Kebijakan dan program pembangunan Repelita VI merupakan salah satu dasar pertimbangan dan masukan bagi penyusunan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004. Dalam pembangunan pendidikan pada Repelita IV tersebut, disusun serangkaian kebijakan yang meliputi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; pembinaan pendidikan menengah umum dan kejuruan; pembinaan pendidikan tinggi; pembinaan pendidikan luar sekolah; pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya; pengembangan kurikulum; pengembangan buku; pembinaan sarana dan prasarana pendidikan; peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha; serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan.

1. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) Sembilan Tahun dilaksanakan sebaik-baiknya agar terwujud pendidikan dasar yang bermutu dan dapat menjangkau penduduk di daerah terpencil. Pelaksanaan WAJAR DIKDAS Sembilan Tahun dimulai pada tahun pertama Repelita VI dan diselesaikan selambat-lambatnya dalam tiga Repelita sesuai dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat.

Dalam pemerataan dan perluasan, kebijakan yang diambil antara lain: pembebasan biaya SPP secara bertahap, pembebasan syarat masuk SMP dan SLTP, dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi murid yang berprestasi.

Untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dilakukan kebijakan pengembangan kurikulum dan metode mengajar, terutama kurikulum muatan

lokal SLTP yang diperkaya dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan setempat bagi siswa SLTP yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Materi pelajaran yang dapat menumbuhkembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan mempertinggi ketahanan agama juga dikembangkan secara seimbang. Kualitas diupayakan melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Sehubungan dengan efisiensi dan efektivitas pendidikan, kebijakan diupayakan agar pembangunan gedung sekolah disesuaikan dengan peta pendidikan yang tetap memberikan kesempatan sekolah swasta untuk berkembang.

2. Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan

Dalam hal pemerataan dan perluasan pendidikan, kebijakan yang dilakukan adalah penyelenggaraan Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan ukuran daya tampung yang besar, yaitu antara 3 ribu hingga 5 ribu murid.

Sementara itu, kebijakan yang berkaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan diupayakan melalui pengembangan kurikulum yang bercirikan penyelenggaraan pendidikan per catur wulan, penjurusan di kelas III, dan komponen kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan di semua SMU. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dilakukan kebijakan penataan program studi dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat melalui pengembangan sistem pemagangan di dunia usaha.

3. Pendidikan Tinggi

Kebijakan pemerataan dan perluasan pendidikan dilakukan dengan memperbesar daya tampung perguruan tinggi (PT), baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, dan melalui penyelenggaraan pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh.

Sehubungan dengan mutu dan relevansi pendidikan, kebijakan yang dilakukan antara lain penyeimbangan dan penyelerasian jumlah dan jenis program studi bidang eksakta dan sosial, serta humaniora dan seni, dengan memperhatikan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek. Mutu program pascasarjana ditingkatkan dengan merintis penerimaan mahasiswa melalui ujian seleksi atau ujian penempatan. Pengendalian mutu perguruan tinggi dilakukan melalui akreditasi untuk perguruan tinggi negeri dan swasta secara bertahap, di samping kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dalam rangka peningkatan mutu, pembinaan dan pengembangan jiwa kepemimpinan diselenggarakan baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan ko-kurikuler.

4. Pendidikan Luar Sekolah

Kebijakan pemerataan dan perluasan pendidikan luar sekolah (PLS) dilakukan dengan memperluas jenis dan jangkauan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pengikatan pengetahuan dasar dan keterampilan wirusaha. Program kelompok belajar Paket A dan Paket B ditujukan untuk menuntaskan tiga buta, yaitu buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar bagi penduduk yang tidak mampu mengikuti pendidikan dasar di sekolah.

Menyangkut mutu dan relevansi pendidikan, program PLS yang diselenggarakan masyarakat dibina dan dikembangkan agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan

masyarakat, serta dapat memberikan landasan yang kuat bagi pembentukan kepribadian, penanaman nilai-nilai agama, budaya, moral, dan budi pekerti luhur. Sistem dan prosedur pembinaan belajar usaha dan magang disempurnakan dan diselenggarakan secara terpadu dengan berbagai program sejenis lainnya.

5. Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya dilaksanakan melalui pendidikan, penataran, dan penyegaran. Kesempatan belajar dan beasiswa dibeikan kepada tenaga kependidikan yang mampu dari segi akademik, berdedikasi, dan berprestasi dalam tugasnya. Upaya pembinaan karir yang terencana dan penghargaan yang memadai diusahakan bagi mereka yang bertugas di daerah perdesaan dan terpencil. Insentif dan penghargaan bagi guru yang berprestasi dan berdedikasi dikembangkan untuk memacu prestasi mereka.

Untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan tenaga kependidikan antardaerah, dilakukan penyempurnaan sistem pengadaan, pengangkatan, dan penempatan tenaga kependidikan. Penataan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) perlu dilakukan untuk menghadapi persoalan pengadaan tenaga kependidikan.

6. Pengembangan Kurikulum

Kebijakan yang dilakukan adalah memperkaya kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan zaman, tuntutan pembangunan dan kebutuhan, dan perkembangan daerah setempat. Mata pelajaran yang bertujuan membina keseimbangan antara kualitas nalar dan kematangan rohani terus diberikan secara berkesinambungan. Isi kurikulum dan metode belajar mengajar dikembangkan agar lebih mampu menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya ipyek dan kepemimpinan peserta didik sejak usia dini. Iklim belajar yang mendukung dan penyelenggaraan kegiatan ilmiah terus dikembangkan. Kegiatan

ekstrakurikuler dikembangkan untuk meningkatkan daya kreativitas, keterampilan, kepemimpinan, dan penanaman disiplin siswa.

7. Pengembangan Buku

Kebijakan pengembangan buku dilakukan melalui penilaian secara berkala terhadap bahan ajar yang runtut sejak tingkat dasar sampai tingkat menengah. Materi buku terus dimantapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diupayakan untuk tidak terjadi penggantian buku pelajaran yang terlampau sering. Penyediaan buku pelajaran murid dengan rasio satu buku satu murid diusahakan bagi sekolah di daerah miskin atau daerah tertinggal. Buku bacaan diupayakan dengan harga yang terjangkau dan disediakan di perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat. Pengadaan perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat ditingkatkan hingga ke pelosok. Di samping itu juga diberikan penghargaan yang memadai kepada penulis dan pemeberian jaminan perlindungan hak cipta.

8. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Upaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ditigkatkan, baik dalam jumlah maupun mutunya di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kebutuhan, termasuk sarana olahraga dan pendidikan jasmani. Pembangunan sarana pendidikan yang baru disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah yang berwawasan lingkungan, serta menjamin keamanan dan kenyamanan belajar-mengajar.

9. Peningkatan Peranserta Masyarakat termasuk Dunia Usaha

Usaha penignkatan peranserta masyarakat dilakukan dengan mengembangkan mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan bagi peserta didik dan lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha. Hubungan yang lebih erat dan serasi antara sekolah dan keluarga peserta didik dan masyarakat dibina dan

dikembangkan, terutama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Kelompok masyarakat mampu didorong untuk memberikan sumbangan yang lebih besar dalam membiayai pendidikan.

Bagi masyarakat yang tidak mampu disediakan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, demi pemerataan dan keadilan pendidikan. Dunia usaha didorong untuk turut membantu penyelenggaraan pendidikan dengan menyediakan beasiswa kepada peserta didik berprestasi yang kurang mampu, memberi bantuan tenaga, serta menyediakan fasilitas untuk magang. Sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pendidikan dari dunia usaha perlu didorong. Pembinaan dan pengawasan lembaga pendidikan swasta ditingkatkan dan diarahkan agar dapat lebih berperan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas dan perluasan pemerataan kesempatan pendidikan.

10. Peningkatan Efisiensi, Efektivitas, dan Produktivitas Pendidikan

Upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan terus dilakukan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk peningkatan kemampuan dan penyempurnaan perencanaan terpadu, administrasi pelayanan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengorganisasian, hubungan luar negeri, hukum, dan ketatusahaan. Penelitian dan pengembangan kebijakan, pengelolaan dan penyajian informasi, pengembangan kurikulum, teknologi pendidikan, dan pengujian ditingkatkan. Sejalan dengan itu, ditingkatkan pula sistem pengendalian dan pengawasan program pendidikan secara menyeluruh, baik di pusat maupun di daerah.

B. ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

1. Kebijakan Pembangunan Pendidikan

- a .Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidika

- b. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik.
- c. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

1.1 Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah

- a. Subsidi pendidikan diberikan kepada kepada sekolah swasta agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas dengan mengusahakan terwujudnya keseimbangan gender.
- b. Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu dengan memperhatikan kesetaraan gender. Pemberian beasiswa ditujukan agar semua penduduk dapat menyelesaikan pendidikan serendah-rendahnya sampai tingkat SLTP atau yang setara.
- c. Peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya diusahakan secara adil dan seimbang dalam rangka mendukung peningkatan kualitas, citra, wibawa, harkat, dan martabat guru.
- d. Penyempurnaan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah, kapasitas peserta didik, serta peningkatan kemampuan dan kreativitas guru. Terwujudnya kesetaraan gender dalam penguasaan pengetahuan dasar (seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan alam), wawasan kebangsaan, kepribadian, moral, sikap, tatakrma, menghargai sesama manusia dan alam perlu mendapat penekanan.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang responsif gender, penggunaan dan perawatan berbagai sarana seperti buku pelajaran, buku bacaan, alat pelajaran, perpustakaan, laboratorium, ruang

Kelompok Kerja Guru (KKG), dan ruang lainnya diusahakan secara bertahap.

- f. Pemberdayaan dan peningkatan kemampuan manajemen tenaga kependidikan diusahakan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Program pemberdayaan ini perlu diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara bertahap dan intensif agar kinerja sekolah dapat bertahan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan.
- g. Pemberian beasiswa/subsidi pendidikan yang seimbang berdasarkan jenis kelamin dengan memberikan prioritas yang lebih besar kepada peserta didik perempuan yang berprestasi tetapi kurang mampu.
- h. Alokasi pengangkatan guru kelas dan guru bidang studi dilaksanakan secara profesional.

1.2. Program Pendidikan Menengah

- a. Pemberian beasiswa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan proporsional kepada siswa yang memiliki prestasi belajar memadai tetapi berkemampuan ekonomi lemah.
- b. Pemberian subsidi kepada sekolah swasta dengan prioritas sekolah-sekolah di daerah yang kurang mampu dalam bentuk imbal swadaya dan bentuk lainnya.
- c. Peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru secara adil dan proporsional kepada guru melalui akreditasi dan sertifikasi mengajar bidang-bidang tertentu yang dievaluasi secara periodik, serta penyempurnaan sistem angka kredit untuk peningkatan karir guru.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang responsif gender, penggunaan dan perawatan berbagai sarana seperti buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat pelajaran, laboratorium, dan perpustakaan di sekolah swasta dan sekolah negeri diusahakan secara bertahap.

- f. Pengembangan pendekatan proses pembelajaran yang berwawasan gender melalui pembinaan dan pelatihan guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan.
- g. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang efektif untuk meningkatkan pengendalian kualitas pendidikan dan menghilangkan kesenjangan gender.
- h. Pemberian beasiswa kepada siswa secara proporsional untuk memasuki jurusan-jurusan atau program studi yang bias gender dengan tetap memperhatikan kualitas.
- i. Perekrutan dan pelatihan pengembang kurikulum dan penulis buku pelajaran secara proporsional dan bertahap.
- j. Pengkajian dan evaluasi isi kurikulum dan buku materi pelajaran yang bias gender.
- k. Pemberian pemahaman dan penyadaran kepada lembaga-lembaga pendidikan menengah dan masyarakat tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam pendidikan.

1.3. Program Pendidikan Tinggi

- a. Peningkatan kualitas tenaga pengajar perguruan tinggi dan peningkatan jumlah tenaga pengajar perempuan secara proporsional sehingga dicapai keseimbangan jumlah tenaga pengajar menurut jenis kelamin.
- b. Penyempurnaan kurikulum agar sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, termasuk pengembangan dan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender yang dilaksanakan di berbagai institusi pendidikan.
- c. Peningkatan kualitas peneliti melalui pendidikan lanjut dan pelatihan secara proporsional.
- d. Perluasan dan pemberdayaan pusat-pusat studi perempuan.

- e. Penyebaran konsep pengarusutamaan gender melalui pelatihan dan pendidikan ulang di berbagai instansi.
- f. Peningkatan jumlah mahasiswa pada pendidikan tinggi secara proporsional dan intervensi pemerintah dilaksanakan dalam rangka kesetaraan dan keadilan gender.
- g. Pengurangan kesenjangan gender di lembaga-lembaga pendidikan tinggi melalui penerangan umum.

1.4. Program Pendidikan Luar Sekolah

- a. Percepatan proses penuntasan tiga buta dengan penekanan pada perluasan akses perempuan.
- b. Pengembangan model pembelajaran untuk program pendidikan berkelanjutan yang tidak bias gender dan berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, permintaan pasar, dan keterampilan berwirausaha sebagai bekal kemampuan bekerja dan berusaha.
- c. Penyusunan masukan untuk rancangan ketetapan persyaratan kerja dan sistem penggajian di berbagai lapangan kerja dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

1.5. Program Sinkronisasi dan Koordinasi

- a. Menyelenggarakan pelatihan dan penerangan umum melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran gender bagi pengelola pendidikan, pelaksana pendidikan, dan masyarakat umum yang secara langsung berkaitan dengan pendidikan.
- b. Menyempurnakan statistik pendidikan (sekolah dan luar sekolah) yang dapat menghasilkan indikator pendidikan yang responsif gender secara berkelanjutan.
- c. Memperbaiki sistem penerimaan kepala sekolah dan pengawas baru yang lebih seimbang sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender.

- d. Mempertimbangkan unsur jenis kelamin dalam pengangkatan pejabat struktural di lingkungan depdiknas mulai dari tingkat nasional, propinsi, daerah, sampai tingkat satuan pendidikan.
- e. Mensosialisasikan proses pendidikan dan pembelajaran yang berwawasan gender melalui pelatihan dan penerangan umum kepada para pejabat pendidikan (misalnya melalui program kursus penjurangan) di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat umum.

2. Data Pembuka Wawasan

Berdasarkan data statistik, baik yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) maupun dari Depdiknas, serta hasil-hasil pengamatan terhadap sistem pendidikan nasional, ditemukan adanya kesenjangan gender sebagai berikut :

1. Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain pada gejala berbedanya akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Susenas 1999 menunjukkan penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan SLTP ke atas baru mencapai 31,4%; sementara penduduk laki-laki yang telah berhasil menyelesaikan tingkat pendidikan tersebut adalah 36%. Data tersebut menunjukkan semakin sedikit penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dibanding laki-laki. Berdasarkan Susenas 1977, penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi baru sekitar 2,07%, atau lebih sedikit dari penduduk laki-laki yang berpendidikan tinggi yang mencapai 3,24%. Selain itu prosentase penduduk perempuan yang buta huruf berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat 1998 adalah sebesar 14,46%, juga jauh lebih tinggi dari penduduk laki-laki buta huruf yang mencapai angka 6.6%.
2. Prosentase penduduk perempuan yang melek huruf terus meningkat, tetapi masih tetap tertinggal oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 1980 hanya 63% penduduk perempuan melek huruf berbanding dengan 80%

- penduduk laki-laki melek huruf (Sensus Penduduk 1980). Pada tahun 1990, prosentase melek huruf penduduk perempuan meningkat menjadi 79%, sementara penduduk laki-laki melek huruf sudah mencapai 90% (Sensus Penduduk 1990). Penduduk perempuan yang melek huruf terus meningkat mencapai 85,54%, tetapi masih tetap tertinggal dari penduduk laki-laki melek huruf yang mencapai 93,4% (Susenas 1996).
3. Kesempatan memperoleh pendidikan untuk perempuan relatif lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 1998/1999, Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan di Sekolah Dasar (SD) adalah 93% berbanding APM laki-laki 97,1%. Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), APM perempuan 54,7%, sedangkan APM laki-laki 57,1%. Di Sekolah Menengah (SM), APM perempuan adalah 29,8%, sedangkan APM laki-laki 30,17%. Selanjutnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) di perguruan tinggi, perempuan 8,9%, sedangkan laki-laki 10,9%.
 4. Dari hasil pengamatan, proses pembelajaran cenderung belum berwawasan gender dan masih memihak laki-laki (*bias toward male*). Laki-laki cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih diuntungkan dalam keseluruhan proses pendidikan. Misalnya, dalam memimpin kelas, memimpin organisasi siswa, memimpin diskusi, mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, atau memimpin kelompok belajar.
 5. Walaupun dengan angka partisipasi yang lebih rendah, perempuan lebih mampu bertahan dibandingkan dengan laki-laki. Angka putus sekolah siswa perempuan selalu lebih kecil, khususnya pada Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan perguruan tinggi (PT). Siswa perempuan juga lebih banyak yang dapat menyelesaikan sekolah dibandingkan dengan lawan jenisnya. Gejala tersebut menunjukkan bahwa peserta didik perempuan lebih optimal dalam memanfaatkan kesempatan belajar.
 6. Muatan buku-buku pelajaran yang membahas status dan fungsi perempuan dalam masyarakat banyak berpengaruh terhadap kesenjangan

- gender dalam proses pendidikan. Muatan sebagian buku pelajaran, khususnya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Jasmani, Bahasa dan Sastra Indonesia, serta Kesenian, cenderung belum berwawasan gender. Para pengembang kurikulum dan penulis buku pelajaran lebih dominan laki-laki, yaitu sebesar 85% (Gramedia, 2000). Hal ini berkaitan erat dengan substansi pelajaran yang akan mempengaruhi kesenjangan gender.
7. Berdasarkan data Depdiknas (1998), laki-laki lebih dominan dalam memilih jurusan atau program studi yang mempelajari kejuruan atau keahlian pada bidang-bidang pertanian dan kehutanan (72,05%), serta teknologi dan industri (97,56%). Sementara itu perempuan lebih banyak yang mempelajari program studi kejuruan bidang ketatausahaan (76,52%), pekerjaan sosial (49,3%), serta teknologi kerumahtanggaan (98,1%).
 8. Berdasarkan statistik perguruan tinggi (1998), perempuan lebih dominan pada jurusan-jurusan keahlian yang dianggap sesuai dengan peran jenisnya, seperti keahlian terapan bidang manajemen (57,7%), pelayanan jasa dan transportasi (64,2%), bahasa dan sastra (58,6%), serta psikologi (59,9%). Sementara laki-laki lebih dominan dalam jurusan teknologi dan ilmu-ilmu dasar (*basic sciences*), seperti fisika, kimia, biologi.

3. Kesenjangan Gender; Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam empat faktor mendasar, yaitu partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat.

3.1. Faktor Partisipasi

- a. Kesenjangan angka partisipasi pendidikan menurut jenis kelamin di SD lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya yang tumbuh

dan berkembang dalam masyarakat daripada oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang sudah tersebar relatif merata. Faktor-faktor sosial budaya tersebut antara lain adalah nilai dan sikap yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat berkaitan dengan fungsi dan peran anggota masyarakat sesuai dengan jenis kelamin. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah penopang ekonomi keluarga (*bread winner*), dan oleh karena itu anak laki-laki lebih penting untuk memperoleh pendidikan daripada anak perempuan yang dianggap lebih berperan dalam lingkungan keluarga (*domestic function*). Faktor nilai sosial budaya ini berkaitan dengan faktor ekonomi. Misalnya, jika ketersediaan biaya sekolah terbatas, maka sebagian besar keluarga akan lebih memilih anak laki-laki sebagai prioritas untuk bersekolah daripada anak perempuan.

- b.** Sebaliknya, faktor kesenjangan pendidikan di SLTP menunjukkan kecenderungan yang sedikit berbeda. Perbedaan kesempatan memperoleh pendidikan menurut jenis kelamin di SLTP cenderung lebih dipengaruhi oleh kondisi keterjangkauan fasilitas pendidikan atau jarak antara rumah dan sekolah, terutama di daerah-daerah perdesaan terpencil yang sulit dijangkau. Faktor kondisi keterjangkauan fasilitas pendidikan dapat memperkeci kemungkinan bagi perempuan untuk bersekolah.
- c.** Kesempatan belajar di SMU sudah mulai menunjukkan keseimbangan gender. Namun berbagai gejala yang ditemukan menunjukkan bahwa perempuan kurang terwakili (*under represented*) dalam komposisi siswa di SMK dan pendidikan tinggi. Gejala tersebut merupakan akibat dari adanya stereotipe dalam masyarakat tentang peran gender. Perempuan lebih banyak terdapat pada jurusan atau program studi ilmu-ilmu perilaku dan pelayanan sosial, seperti psikologi, ilmu pendidikan, perawat kesehatan, dan bisnis. Sementara itu, laki-laki mendominasi jurusan atau program studi ilmu-ilmu murni dan "ilmu-ilmu

keras" (*basic sciences and hard sciences*), seperti ilmu pengetahuan alam, otomotif, teknik sipil, dan teknologi industri.

- d. Di samping lebih rendahnya angka partisipasi perempuan pada setiap jenjang pendidikan, laki-laki cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena nilai budaya dan sikap masyarakat yang menganggap peran laki-laki lebih penting dalam berbagai dimensi kehidupan. Laki-laki masih dominan berperan sebagai kepala keluarga, pemimpin masyarakat, serta pemimpin dalam berbagai lembaga birokrasi.
- e. Perempuan lebih mampu bertahan di sekolah dan menyelesaikan studi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena jumlah perempuan masih sedikit dalam komposisi siswa sekolah. Untuk itu partisipasi perempuan telah terseleksi secara baik. Di samping itu, perempuan dianggap memiliki karakteristik yang dapat mendorong keberhasilan mereka, seperti ketelitian, ketekunan, kesabaran, dan kesungguhan yang lebih menonjol daripada yang dimiliki laki-laki.

3.2. Faktor Akses

- a. Akses perempuan dalam penulisan buku pelajaran yang terbatas menyebabkan proporsi penulis buku pelajaran didominasi oleh laki-laki yang belum responsif gender sangat besar, yakni 85%.
- b. Terdapat keterbatasan akses bagi perempuan untuk menjadi tenaga pengajar terutama untuk pada SLTP ke atas. Akibatnya, proses pembelajaran belum berorientasi terhadap kesetaraan gender, serta lebih menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan (*bias against female*). Hal ini diperparah lagi oleh kesadaran guru akan kesetaraan gender yang masih rendah.
- c. Akses bagi perempuan terhadap jurusan-jurusan ilmu dasar seperti fisika, kimia, biologi, serta ilmu-ilmu keras seperti teknologi dan industri masih

rendah. Hal ini bukan diakibatkan oleh sistem seleksi masuk perguruan tinggi, melainkan lebih disebabkan oleh rendahnya proporsi perempuan yang memilih jurusan IPA atau Matematika di SMU.

3.3. Faktor Kontrol

- a. Dalam keluarga, ayah berfungsi sebagai kepala keluarga. Nilai, sikap, pandangan, dan perilaku ayah sebagai kepala keluarga berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan keluarga, khususnya keputusan untuk memilih jurusan atau keahlian bagi anak-anak. Perempuan yang dianggap pemeran fungsi domestik (*domestic role*), lebih diarahkan untuk memilih jurusan atau keahlian yang dianggap oleh orang tua sesuai dengan peran jenisnya, seperti psikologi, bahasa dan sastra, dan perawat kesehatan. Di pihak lain, laki-laki yang dianggap penopang ekonomi keluarga (*bread winner*), diarahkan untuk memilih ilmu-ilmu dasar dan teknologi.
- b. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Keadaan ini dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan yang kurang sensitif gender, yang selanjutnya dapat membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perempuan.

3.4. Faktor Manfaat

- a. Pemegang kebijakan dalam struktur pemerintahan didominasi oleh laki-laki, khususnya di lingkungan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah perempuan yang memperoleh kesempatan memegang jabatan birokrasi. Dengan latar belakang pendidikan yang kurang, perempuan tertinggal jauh dalam menduduki posisi penting dalam jabatan struktural saat ini. Proporsi pegawai negeri sipil (PNS) perempuan hanya 35,4%. Data juga menunjukkan semakin tinggi golongan jabatan, semakin kecil proporsi perempuan yang ada di dalamnya.

- b. Sebagai akibat dari ketidaksadaran gender dalam pendidikan, serta dalam pemilihan jurusan-jurusan keahlian, maka laki-laki memiliki kesempatan memperoleh keahlian dan status profesional yang tinggi. Akibat lebih lanjut, rata-rata penghasilan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penghasilan perempuan.

4. Masalah Gender

Berdasarkan kenyataan tentang kesenjangan gender dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat diidentifikasi beberapa masalah gender dalam pembangunan pendidikan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yaitu :

- a. Kesenjangan gender paling menonjol terjadi di SD, SMK, dan PT; tetapi lebih seimbang pada SLTP dan SMU. Namun demikian, masih terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin lebar kesenjangan gendernya. Kesenjangan ini secara umum dipengaruhi oleh nilai sosial budaya patriarki yang dianut masyarakat Indonesia, mulai nilai-nilai yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan untuk perempuan sampai dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan peran jenis kelamin dalam masyarakat dalam memilih jurusan atau keahlian.
- b. Buku-buku mata pelajaran yang bias gender, khususnya yang berhasil diamati pada mata pelajaran-mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, akan mempertahankan kesenjangan gender dalam waktu yang lama. Hal ini juga akan mengakibatkan perempuan tetap dianggap sebagai warga negara yang kurang produktif.
- c. Rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan akan mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang efisien. Padahal kemampuan perempuan relatif lebih tinggi untuk bertahan dan menyelesaikan studi. Hal ini dibuktikan oleh lebih rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas bagi murid perempuan dibandingkan

murid laki-laki, serta lebih tingginya angka kelulusan dan angka bertahan (*retention rate*) murid perempuan dibandingkan murid laki-laki.

- d. Posisi perempuan yang kurang strategis dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan mengakibatkan kesenjangan gender terlembagakan (*institutionalized*) dalam berbagai dimensi sistem pendidikan. Sikap para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih bias gender secara konsisten dan berkesinambungan mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang bertahan dalam waktu yang lama.
- e. Masih terjadinya gejala pemisahan gender (*gender segregation*) dalam pemilihan jurusan atau program studi berakibat terjadinya diskriminasi gender (*gender discrimination*) pada institusi-institusi kerja dan pada sistem penggajian. Kenyataan ini disebabkan oleh nilai dan sikap keluarga yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat, yang kemudian menimbulkan bias gender dalam peran-peran sosial mereka.

C. REFORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG RESPONSIF GENDER

1. Kebijakan Pendidikan yang Responsif Gender

Pembangunan pendidikan nasional dilakukan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam proenas 2000 sebagai berikut :

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman

- peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
 - e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
 - f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

Untuk melaksanakan kebijakan pendidikan tersebut ditetapkan berbagai program pembangunan pendidikan , antara lain program pendidikan dasar dan prasekolah, program pendidikan menengah, program pendidikan tinggi, program pendidikan luar sekolah, program sinkronisasi dan koordinasi pembangunan pendidikan nasional, perogram penelitian dan peningkatan kapasitas, program pengembangan kemampuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta program peningkatan kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah

Program pendidikan dasar dan prasekolah bertujuan untuk: (!) memperluas jangkauan dan daya tampung lembaga prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat; (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan prasekolah dengan kualitas yang memadai, dan (4) terselenggaranya manajemen pendidikan prasekolah berbasis sekolah dan masyarakat (*school/community based management*).

b. Program Pendidikan Menengah

Program pendidikan menengah bertujuan untuk : (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) bagi seluruh masyarakat; (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, dan masyarakat miskin; (3) meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai kebutuhan dunia kerja; (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia; (5) meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik; (6) meningkatkan efektivitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat; (7) meningkatkan kinerja individu dan lembaga pendidikan; (8) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan; dan (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

c. Program Pendidikan Tinggi

Program pendidikan tinggi bertujuan untuk: (1) melakukan penataan sistem pendidikan tinggi; (2) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja; dan (3) meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan tinggi, khususnya bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

d. Program Pendidikan Luar Sekolah

Program pendidikan luar sekolah (PLS) bertujuan untuk menyediakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, program PLS diarahkan pada pemberian pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu mewujudkan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota keluarganya.

e. Program Sinkronisasi dan Koordinasi

Program sinkronisasi dan koordinasi bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program-program pendidikan baik antarjenjang, antarjalur, dan antarjenis, maupun antardaerah.

2. Indikator Kinerja Gender

a. Pemerataan Kesempatan Belajar

Indikator kinerja gender pada aspek pemerataan kesempatan belajar meliputi angka partisipasi, proporsi siswa/mahasiswa, proporsi guru/dosen, lulusan yang melanjutkan, dan angka bertahan di sekolah. Selengkapnya data indikator kinerja gender aspek kesempatan belajar yang berhasil dikembangkan pada tahun 1998 dituangkan pada tabel berikut .

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Gender Aspek Pemerataan Kesempatan Belajar

| Jenis Indikator | Tahun 1998 (dalam %) | | |
|--|-------------------------|------|------|
| | L | P | L+P |
| 1. Angka Partisipasi Murni | | | |
| a. SD | 97,1 | 92,8 | 95,0 |
| b. SLTP | 57,1 | 54,7 | 55,9 |
| c. SM | 37,9 | 37,4 | 37,6 |
| d. SMU | 20,1 | 20,6 | 20,4 |
| e. SMK | 14,7 | 12,1 | 13,4 |
| f. PT | 12,3 | 8,0 | 10,1 |
| 2. Proporsi Siswa/Mahasiswa | | | |
| a. SD | 51,8 | 48,2 | 100 |
| b. SLTP | 52,0 | 48,0 | 100 |
| c. SM | 49,8 | 50,2 | 100 |
| d. SMU | 49,9 | 50,1 | 100 |
| e. SMK | 52,2 | 47,8 | 100 |
| f. PT | 55,1 | 44,9 | 100 |
| 3. Proporsi Guru/Dosen | | | |
| a. SD | 46,7 | 53,3 | 100 |
| b. SLTP | 56,6 | 43,4 | 100 |
| c. SM | 65,9 | 34,1 | 100 |
| d. SMU | 61,4 | 38,6 | 100 |
| e. SMK | 60,1 | 22,7 | 100 |
| f. PT | 61,3 | 38,7 | 100 |
| 4. Lulusan Melanjutkan | | | |
| a. SD ke SLTP | 72,5 | 75,6 | 73,9 |
| b. SLTP ke SMU | 45,1 | 68,3 | 45,2 |
| c. SLTP ke SMK | 35,7 | 23,0 | 29,4 |
| d. SMU ke Politeknik | 22,1 | 24,7 | 23,4 |
| e. SMU ke Program Strata | 33,7 | 26,4 | 30,1 |
| f. SMU ke LPTK | 17,0 | 19,6 | 18,3 |
| g. SMU ke PT Umum | 38,8 | 31,6 | 35,3 |
| 5. Angka Bertahan Menurut Jenjang | | | |
| a. SD | 82,3 | 88,5 | 85,3 |
| b. SLTP | 88,9 | 90,2 | 89,6 |
| c. SM | 82,0 | 94,9 | 88,0 |
| d. SMU | 86,8 | 92,5 | 89,5 |
| e. SMK | 75,6 | 99,2 | 85,5 |

b. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Indikator kinerja gender aspek kurikulum dan pembelajaran meliputi proporsi tenaga pengembang kurikulum, proporsi penulis buku pelajaran, proporsi pejabat struktural pendidikan, dan proporsi kepala sekolah. Selengkapanya indikator kinerja gender aspek kurikulum dan pembelajaran ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Gender Aspek Kurikulum dan Pembelajaran

| Jenis Indikator | Tahun 1998 (dalam %) | | |
|--|-------------------------|-------|-----|
| | L | P | L+P |
| 1. Proporsi Tenaga Pengembang Kurikulum | | | |
| a. Ilmu-ilmu Sosial | 87,96 | 12,04 | 100 |
| b. Ilmu-ilmu Alam | 80,90 | 19,10 | 100 |
| c. Teknik | 71,82 | 28,28 | 100 |
| d. Bahasa | 68,09 | 31,91 | 100 |
| 2. Proporsi Penulis Buku Pelajaran | | | |
| a. SD | 85,5 | 14,4 | 100 |
| b. SLTP | 85,4 | 14,6 | 100 |
| c. SMU | 84,1 | 15,9 | 100 |
| d. SMK | 84,4 | 15,6 | 100 |
| 3. Proporsi Pejabat Struktural Pendidikan | | | |
| a. Eselon I | 95,15 | 4,85 | 100 |
| b. Eselon II | 96,00 | 4,00 | 100 |
| c. Eselon III | 92,60 | 7,40 | 100 |
| d. Eselon IV | 87,30 | 12,70 | 100 |
| e. Eselon V | 83,43 | 16,57 | 100 |
| 4. Proporsi Kepala Sekolah | | | |
| a. SD | 73,5 | 26,5 | 100 |
| b. SLTP | 88,6 | 11,4 | 100 |
| c. SM | 90,4 | 9,6 | 100 |
| d. SMU | 90,7 | 9,3 | 100 |
| e. SMK | 89,9 | 10,1 | 100 |

c. Penjurusan dan Program Studi

Indikator kinerja gender aspek penjurusan dan program studi meliputi proporsi siswa SMU menurut program studi, proporsi siswa SMK menurut jenis kejuruan, proporsi mahasiswa menurut program studi kependidikan, proporsi mahasiswa menurut program studi nonkependidikan, dan proporsi sarjana PNS menurut keahlian.

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Gender Aspek Penjurusan dan Program Studi

| Jenis Indikator | Tahun 1998 (dalam %) | | |
|---|-------------------------|-------|-----|
| | L | P | L+P |
| 1. Proporsi SiswaSMU Menurut Program Studi | | | |
| a. Bahasa | 45,13 | 54,87 | 100 |
| b. IPA | 52,29 | 47,71 | 100 |
| c. IPS | 49,07 | 50,93 | 100 |
| 2. Proporsi Siswa SMK Menurut Jenis Kejuruan | | | |
| a. Pertanian dan Kehutanan | 72,05 | | |
| b. Teknologi dan Industri | 97,56 | 27,95 | 100 |
| c. Bisnis dan Manajemen | 23,48 | 2,44 | 100 |
| d. Kesejahteraan Masyarakat | 50,70 | 76,52 | 100 |
| e. Pariwisata | 48,41 | 49,30 | 100 |
| f. Seni dan Kerajinan | 40,03 | 51,59 | 100 |
| 3. Proporsi Mahasiswa Menurut Jurusan/Program Studi Kependidikan | | 59,07 | 100 |
| a. Teknik | 52,59 | 47,41 | 100 |
| b. Ilmu sosial/ilmu perilaku | 45,70 | 54,30 | 100 |
| c. IPA | 46,31 | 53,69 | 100 |
| 4. Proporsi Mahasiswa Menurut Jurusan/Program Studi Non Kependidikan | | | |
| a. Teknik | 80,21 | 19,79 | 100 |
| b. Ekonomi dan bisnis | 55,14 | 44,86 | 100 |
| c. Ilmu Sosial/ilmu perilaku | 56,19 | 43,81 | 100 |
| d. IPA | 53,33 | 46,67 | 100 |
| 5. Proporsi Sarjana PNS Menurut Keahlian | | | |
| a. Eksakta dan Teknik | 68,70 | 31,30 | 100 |
| b. Ilmu Sosial/ilmu perilaku | 74,65 | 25,35 | 100 |
| c. Sarjana lainnya | 62,81 | 37,19 | 100 |

D. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

1. Rencana Aksi

a. Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah

- (1) Revisi pedoman pembelajaran yang bias gender di TK
- (2) Revisi kurikulum dan muatan buku pelajaran SD dan SLTP yang bias gender.
- (3) Peningkatan angka partisipasi kasar anak usia 13-15 tahun di SD
- (4) Orientasi bagi guru-guru TK, SD, dan SLTP tentang pendidikan yang berwawasan gender.
- (5) Orientasi bagi kepala sekolah TK, SD, dan SLTP tentang manajemen sekolah yang berwawasan gender.

b. Program Pendidikan Menengah

- (1) Peningkatan angka partisipasi pada SMU/SMK.
- (2) Revisi kurikulum dan muatan buku pelajaran SMU dan SMK yang bias gender.
- (3) Orientasi terhadap guru SMU dan SMK tentang pendidikan berwawasan gender.
- (4) Orientasi terhadap kepala sekolah dan tenaga administrasi tentang pengelolaan pendidikan yang berwawasan gender.
- (5) Peningkatan partisipasi belajar bagi lulusan SLTP untuk memasuki SMK yang selama ini didominasi oleh laki-laki dan perempuan saja.

c. Program Pendidikan Tinggi

- (1) Peningkatan partisipasi perempuan untuk memasuki jurusan yang selama ini didominasi laki-laki, seperti teknik dan industri.
- (2) Meningkatkan pengkajian dan publikasi tentang gender pada pusat-pusat studi wanita (PSW) di perguruan tinggi.
- (3) Perluasan jaringan kelembagaan PSW.

- (4) Orientasi bagi tenaga pengajar dan tenaga administrasi tentang wawasan gender.
- (5) Peningkatan kemampuan dan peranan PSW/Universitas dalam advokasi dan sosialisasi gender di daerah.
- (6) Memasukkan materi gender ke dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU).

d. Program Pendidikan Luar Sekolah

- (1) Pemberantasan tiga buta dengan memberi kesempatan yang lebih besar kepada perempuan di daerah perdesaan.
- (2) Pelaksanaan Kelompok Belajar (Kejar) Paket
- (3) Pengembangan model pendidikan berkelanjutan yang berbasis masyarakat (kursus, kelompok belajar usaha/KBU, magang) dalam rangka meningkatkan penguasaan keterampilan berwira usaha yang responsif gender sebagai bekal peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (4) Pengembangan model sosialisasi wawasan gender melalui media massa.
- (5) Pengembangan model sosialisasi wawasan gender untuk keluarga.

e. Program Sinkronisasi dan Sosialisasi

- (1) Sosialisasi perangkat standar nasional.
- (2) Uji-coba lapangan implementasi perangkat satandar nasional.
- (3) Penyempurnaan perangkat standar nasional.
- (4) Studi dan identifikasi bentuk-bentuk layanan profesional.
- (5) Penyusunan jenis-jenis diversifikasi kurikulum.
- (6) Penyusunan perangkat layanan profesional.

2. Indikator Rencana Aksi

a. Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah

- (1) Terrevisinya pedoman pembelajaran TK yang bias gender.

- (2) Terrevisinya kurikulum dan buku pelajaran SD dan SLTP yang bias gender.
- (3) Angka partisipasi di SD dan SLTP bagi laki-laki dan perempuan.
- (4) Komposisi penerima beasiswa menurut gender.
- (5) Jumlah dan proporsi guru TK, SD, dan SLTP yang mendapat pelatihan tentang pendidikan berwawasan gender.
- (6) Jumlah dan proporsi kepala sekolah TK, SD, dan SLTP yang telah dilatih tentang pengelolaan pendidikan yang berwawasan gender.
- (7) Meningkatnya peranan guru wanita dalam pengelolaan manajemen sekolah.

b. Program Pendidikan Menengah

- (1) Keseimbangan angka partisipasi dan penerima beasiswa perempuan dan laki-laki.
- (2) Terrevisinya kurikulum dan buku pelajaran SMU dan SMK yang bias gender.
- (3) Jumlah dan proporsi guru SMU dan SMK yang telah dilatih tentang pendidikan yang berwawasan gender.
- (4) Jumlah dan proporsi kepala sekolah dan tenaga administrasi yang telah dilatih tentang pengelolaan pendidikan yang berwawasan gender.
- (5) Jumlah dan proporsi murid laki-laki dan perempuan yang memasuki SMK menurut program studi.

c. Program Pendidikan Tinggi

- (1) Peningkatan partisipasi perempuan pada jurusan yang selama ini didominasi laki-laki, seperti jurusan teknik dan industri.
- (2) Jumlah kajian dan publikasi tentang gender di perguruan tinggi.
- (3) Terciptanya jaringan kelembagaan PSW.
- (4) Jumlah dan proporsi tenaga pengajar dan tenaga administrasi yang berwawasan gender.

- (5) Peningkatan kemampuan dan peranan PSW/Universitas dalam advokasi dan sosialisasi gender di daerah.
- (6) Dimasukkannya materi gender ke dalam MKDU.
- (7) Keseimbangan angka partisipasi siswa perempuan dan laki-laki, dan keseimbangan penerima beasiswa.
- (8) Terrevisinya kurikulum dan buku pelajaran perguruan tinggi yang bias gender.
- (9) Jumlah dan proporsi dosen yang telah dilatih tentang pendidikan yang berwawasan gender.

d. Program Pendidikan Luar Sekolah

- (1) Penurunan angka buta huruf perempuan dan laki-laki.
- (2) Dikembangkannya model pendidikan berkelanjutan yang berbasis masyarakat (kursus, KBU, magang), yang responsif gender.
- (3) Dikembangkannya model sosialisasi wawasan gender melalui media massa.
- (4) Dikembangkannya model sosialisasi wawasan gender untuk keluarga.

e. Program Sinkronisasi dan Koordinasi

- (1) Keseimbangan jumlah peserta dan petugas sosialisasi yang responsif gender.
- (2) Keseimbangan jumlah peserta dan petugas uji-coba yang responsif gender.
- (3) Terwujudnya perangkat standar nasional yang tidak bias gender.
- (4) Terwujudnya bentuk-bentuk layanan profesional yang tidak bias gender.
- (5) Terwujudnya diversifikasi kurikulum yang tidak bias gender.
- (6) Terwujudnya perangkat layanan profesional yang tidak bias gender.